

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH AND DISPARITIES BETWEEN THE CITIES IN WEST JAVA PROVINCE

Diki Saputra

Program Studi Pendidikan Ekonomi-Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
diki.saputra@student.upi.edu

ABSTRACT

The objective of the research is to know the structure of economic growth and disparities between the cities in West Java province post orde baru. This research used secondary data, and than analyzed by Williamson Index, Location Quotient, Shift Share, and Klassen Typology. Klassen typology analysis result that West Java province in divided in to four classification catagories: rapid growth region, retarded region, growing region, and underdeveloped region. According to Williamson Index, the disparities between the cities in West Java province post orde baru shows the serious condition. Average of Williamson Index is 0,5778 (> 0,5), it shows that disparities of the cities in West Java province is very serious. Kuznets hypothesis showing the relationship between economic growth and disparity inverse U-shapes effect in West Java province. This researchs recommends to local goverments to implement and give more attention to the underdeveloped region without negelecting the rapid growth region, do the economic development in potential sector of each cities by optimalized the technology usage, also build the infrastructure and spread the growth central and investment.

Keywords: Kuznets hypothesis, disparity, economic growth, West Java

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pasca orde baru. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang selanjutnya dianalisis menggunakan Indeks Williamson, *Location Quotient*, *Shift Share*, dan Tipologi Klassen. Hasil analisis Tipologi Klassen, provinsi Jawa Barat diklasifikasikan menjadi empat katagori: daerah maju dan cepat tumbuh, daerah berkembang cepat tapi tidak maju, daerah maju tapi tertekan dan daerah yang tertinggal. Berdasarkan Indeks Williamson, ketimpangan antar kabupeten/kota di provinsi Jawa Barat pasca orde baru menunjukkan angka yang serius. Rata-rata angka indeks Williamson menunjukkan angka 0,5781 (> 0,5), angka sebesar ini menunjukkan telah terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang sangat tinggi. Hipotesis Kuznets yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan yang berbentuk "U terbalik" berlaku di provinsi Jawa Barat. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan agar memprioritaskan daerah yang tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju, melakukan pengembangan ekonomi pada sektor yang potensial di masing-masing kabupaten/kota melalui pengoptimalan penggunaan teknologi, serta membangun infrastruktur dan penyebaran pusat-pusat pertumbuhan dan investasi.

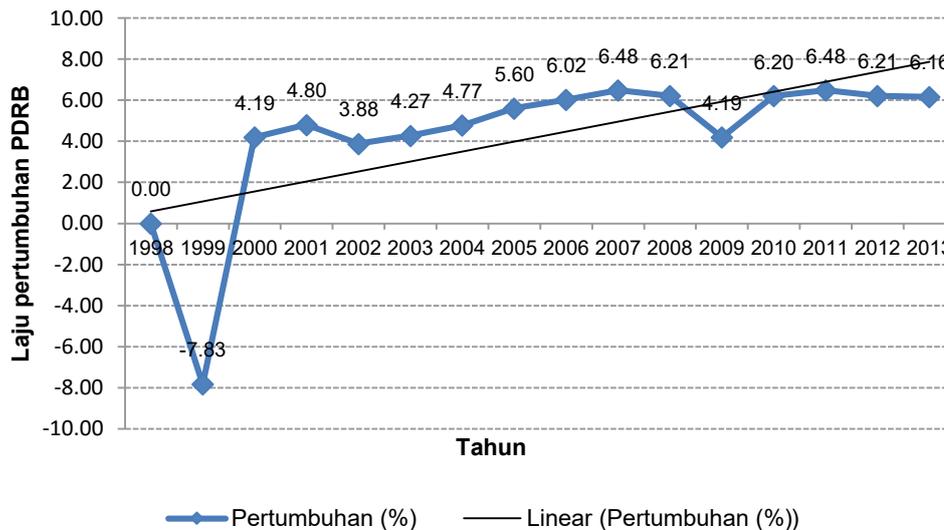
Kata kunci: Hipotesis Kuznets, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, Jawa Barat

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah adalah hal yang menyatu dari pembangunan nasional. Pembangunan harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat secara luas. Manfaat dari pelaksanaan pembangunan harus benar-benar tersampaikan kepada seluruh masa rakyat, bukan hanya memusat kepada sebagian-sebagian saja manfaat pelaksanaan pembangunan itu. Dalam sejarah berjalannya bangsa ini, tantangan untuk menyejahterakan masyarakat secara luas tersebut berusaha dijawab dengan dengan memunculkan Undang-undang (UU) no. 32 tahun 2004 dan UU no. 33

tahun 2004 yang mengatur tentang kebijakan otonomi daerah. Tidak lain tidak bukan, tujuan diadakannya otonomi daerah ini adalah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pendapatan. Kebijakan otonomi daerah dirancang agar mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan antar wilayah sesuai dengan keadaan wilayahnya masing-masing (Nugroho, 2004).

Pemerintah melalui Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa,



Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Koston 2000 Provinsi Jawa Barat Tahun 1998-2013

Sumber: BPS provinsi Jawa Barat, 2015

perencanaan pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti pola tertentu berdasar hasil telaah yang cermat terhadap situasi dan kondisi yang bagus. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999 revisi menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 revisi menjadi undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Kuncoro, 2004).

Kondisi dan potensi ekonomi daerah merupakan modal dasar dan faktor dominan penentu strategi kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Adanya kondisi dan potensi tiap-tiap daerah yang berbeda menyebabkan strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda. Begitupun dengan daerah-daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat, strategi pembangunan ekonomi diambil dan dilaksanakan dengan mengarah kepada perkembangan pusat-pusat sumber pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Selama periode 1998-2012, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Jawa Barat dan laju perumbuhannya menunjukkan angka positif yang bervariasi dan cenderung mengalami peningkatan.

Pascakrisis diakhir masa orde baru tahun 1999, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan proses produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat provinsi Jawa Barat.

Salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah dengan melihat PDRB perkapita. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya, semakin kecil PDRB perkapita suatu daerah maka semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya (Utama, 2010). PDRB perkapita merupakan total PDRB masing-masing kabupaten/kota dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di masing-masing kabupaten/kota.

Berdasarkan tabel 1, nilai PDRB perkapita tertinggi dimiliki oleh kabupaten Bekasi sebesar Rp 21.921.461,08 sedangkan PDRB perkapita terendah dimiliki oleh kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 3.640.969,14. Perbedaan nilai PDRB perkapitan masing-masing kabupaten/kota menandakan terjadinya ketimpangan antar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat yang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya belum diikuti dengan keberhasilan dalam mendistribusikan pendapatan masyarakat di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. PDRB Perkapita di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2013 (rupiah)

	Kabupaten/Kota P	DRB Perkapita
Kabupaten		
1	Kab. Bogor	7.446.652,76
2	Kab. Sukabumi	4.079.042,66
3	Kab. Cianjur	4.296.617,66
4	Kab. Bandung	7.605.238,54
5	Kab. Garut	5.145.602,01
6	Kab. Tasikmalaya	3.640.969,14
7	Kab. Ciamis	5.585.509,92
8	Kab. Kuningan	4.403.410,12
9	Kab. Cirebon	4.482.486,46
10	Kab. Majalengka	4.349.978,85
11	Kab. Sumedang	5.721.670,40
12	Kab. Indramayu	9.770.053,35
13	Kab. Subang	5.544.423,25
14	Kab. Purwakarta	9.799.793,93
15	Kab. Karawang	12.288.407,13
16	Kab. Bekasi	21.921.461,08
17	Kab. Bandung Barat	6.012.207,33
Kota		
18	Kota Bogor	5.636.949,10
19	Kota Sukabumi	7.231.328,97
20	Kota Bandung	16.632.077,58
21	Kota Cirebon	20.377.045,30
22	Kota Bekasi	7.357.699,20
23	Kota Depok	4.056.982,45
24	Kota Cimahi	13.320.963,46
25	Kota Tasikmalaya	7.063.554,26
26	Kota Banjar	4.874.081,60
Jawa Barat		8.531.804,65

Sumber: BPS provinsi Jawa Barat, 2015

Tujuan otonomi daerah untuk pembangunan dengan pemerataan masih belum berhasil karena pembangunan masih selalu terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Adanya perbedaan inilah yang memicu adanya ketimpangan pendapatan antar masyarakat khususnya di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat. Berdasar latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian ini. Melalui penelitian ini penulis akan melihat perkembangan tingkat ketimpangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat pasca orde baru dan penulis ingin mengetahui keterwujudan cita-cita pembangunan melalui reformasi pascakrisis 1998, dua hal inilah yang memberikan warna khusus pada penelitian ini dan menjadikan penelitian ini perlu untuk dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di

provinsi Jawa Barat pasca orde baru?

2. Apakah hipotesis Kuznets tentang U terbalik berlaku di provinsi Jawa Barat pasca orde baru?
3. Bagaimana klasifikasi kemajuan pembangunan ekonomi setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun pasca orde baru?
4. Apakah yang menjadi sektor potensial untuk dikembangkan pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perkembangan tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat pasca orde baru.
2. Mengetahui apakah hipotesis Kuznets tentang U terbalik berlaku di provinsi Jawa Barat pasca orde baru.
3. Mengetahui klasifikasi kemajuan pembangunan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat pasca orde baru.

4. Mengetahui apakah yang menjadi sektor potensial untuk dikembangkan pada setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznet salah satu ekonom besar peraih hadiah nobel di bidang ekonomi pada tahun 1971 memberikan definisi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap tuntutan-tuntutan yang ada (Todaro, 2000).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sukirno, 2004).

Ketimpangan Pendapatan Regional

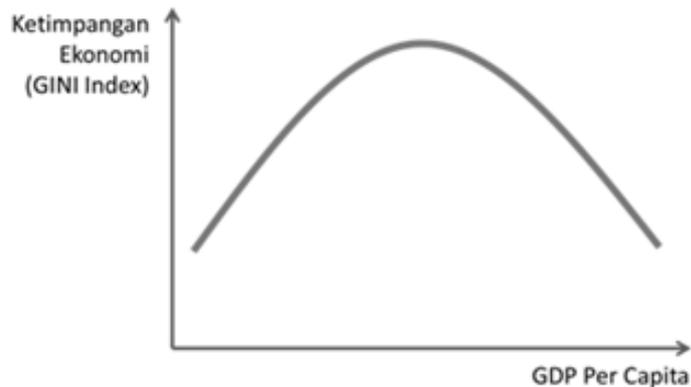
Menurut Emilia dan Imelia (2006) indikator yang digunakan untuk menganalisis ketimpangan antar wilayah antara, PDRB, konsumsi rumah tangga perkapita, kontribusi sektoral terhadap PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal.

Dalam perspektif antarwilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antarwilayah yang satu dengan wilayah yang lain, maupun dalam hal distribusi pendapatan dikalangan penduduk masing-masing wilayah. Ketimpangan regional dalam pembangunan dapat ditengarai antara lain dengan menelaah perbedaan mencolok dalam aspek-aspek seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana perbankan, investasi dan pertumbuhan (Dumairy, 1996).

Isu kesenjangan ekonomi antardaerah telah

lama menjadi bahan kajian para pakar ekonomi regional. Hendra Esmara (1975) merupakan peneliti pertama yang mengukur kesenjangan ekonomi antardaerah. Berdasarkan data dari tahun 1950 hingga 1960, ia menyimpulkan Indonesia merupakan negara dengan kategori kesenjangan daerah yang rendah apabila sektor migas diabaikan. Begitu juga dengan Ardani pada tahun 1996 dan 1992 telah menganalisis kesenjangan pendapatan dan konsumsi antardaerah dengan menggunakan Indeks Williamson, bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi terdapat kesenjangan kemakmuran antar daerah, namun semakin maju pembangunan ekonomi kesenjangan tersebut semakin menyempit. Studi Ardani agaknya sejalan dengan hasil studi Akita dan Lukman pada tahun 1994, yang menemukan tidak terdapatnya perubahan kesenjangan ekonomi antardaerah selama 1983-1990 (Kuncoro, 1997).

Hirschman mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi dipandang secara geografis keadaanya tidak seimbang yakni tidak merata ke semua daerah. Pada awalnya pertumbuhan ekonomi terpusat di beberapa daerah sedangkan pada daerah lainnya dalam keadaan terbelakang. Pada proses pertumbuhan selanjutnya perbedaan-perbedaan ini akan semakin lebar karena terdapat berbagai faktor yang mempersulit daerah miskin untuk berkembang, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatasinya. Begitu juga jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Menurut Hirschman, daerah di suatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas balik (*trickling down effects*). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi pengkutuban (Arsyad, 1997). Pandangan Hirschman ini didukung oleh hipotesis Kuznets dan hasil penelitian Williamson dan El Shaks. Kuznets mengemukakan bahwa pada tahap-tahap permulaan pertumbuhan suatu daerah terdapat pembagian pendapatan yang cenderung semakin tidak merata, tetapi dengan semakin tumbuhnya daerah itu maka pembagian pendapatannya akan semakin merata.



Gambar 2. Kurva Kuznets berbentuk “U terbalik”

Sumber: Todaro, 2000

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan

Menurut Puslitkang Ekobank LIPI 1994 (dalam Prapti, 2006) teori pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan padat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Karl Mark (1787) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap awal pembangunan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital terhadap tenaga kerja sehingga terjadi penurunan terhadap permintaan tenaga kerja. Akibatnya timbul masalah pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan hanya pada tahap awal pembangunan, kemudian pada tahap selanjutnya akan terjadi sebaliknya.
2. Menurut Kuznets seorang ekonom klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidak merataan distribusi pendapatan. Namun bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (an inverse U shaped patern).
3. Para ekonom klasik Roberti (1974), Hayani dan Ruffan (1985), mengemukakan pertumbuhan ekonomi akan selalu cenderung mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan walaupun masih dalam tahap awal pertumbuhan. Bukti empiris dari pandangan isi berdasarkan pengamatan di beberapa negara seperti Taiwan, Hongkong, Singapura, RRC. Kelompok Neo klasik sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada prakteknya

cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

4. Neo Marxist menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan selalu menyebabkan melebarnya jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi yang cenderung meningkatkan konsentrasi penguasaan sumberdaya dan kapital oleh para penguasa modal kelompok “elit” masyarakat. Sebaliknya nonpemilik modal akan tetap berada dalam keadaan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada kesenjangan antarwilayah di dalam negara. Williamson menghubungkan kesenjangan pendapatan rata-rata antarwilayah dengan berbagai faktor termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah. Dalam penelitian ini untuk menghitung ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat digunakan indeks ketimpangan Williamson.

METODE

Objek penelitian merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 1998-2012.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat yang telah dipublikasikan saat penulis akses pada April 2016. Data yang dipergunakan adalah:

1. PDRB atas dasar harga konstan 2000 provinsi Jawa Barat tahun 1998-2013.

2. PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2004-2013.
3. PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000 kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 1998-2013.
4. Jumlah penduduk setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 1998-2013.
5. Jumlah penduduk provinsi Jawa Barat tahun 1998-2013.

Alasan pemilihan periode 1998-2013 karena penulis mempertimbangkan ketersediaan data dan penulis ingin melihat bagaimana arah pembangunan ekonomi provinsi Jawa Barat pasca orde baru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya (Suryana, 2010).

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan dokumen-dokumen yang sudah ada serta berhubungan dengan variabel penelitian seperti data yang berasal dari Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Barat, Karya Ilmiah seperti skripsi, jurnal dan lain-lain. Selain itu studi literatur dari buku, internet dan sumber lainnya yang relevan.

1. Indeks Williamson

Williamson (dalam Sutarno, 2003) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan berkembang. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Metode ini diperoleh dari perhitungan pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah.

Rumus Indeks Williamson (Kuncoro, 2004):

$$IW Z = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n EY_i - YF^0 \frac{f_i}{n}}}{Y}$$

Keterangan:

- IW = Indeks Williamson
- Y_i = PDRB perkapita di kabupaten/kota
- Y = PDRB perkapita di provinsi
- f_i = Jumlah penduduk di kabupaten/kota
- n = Jumlah penduduk di provinsi Jawa Barat

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka kita dapat melihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Besarnya nilai ini bernilai positif dan berkisar antara angka 0-1. Semakin besar nilai indeks ini (mendekati angka 1), berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Apabila nilai indeks Williamson antara di atas 0,5 maka dapat dikatakan terjadi ketidakmerataan tinggi. Namun apabila nilai indeks Williamson dibawah 0,5 maka dapat dikatakan terjadi ketidakmerataan rendah.

Untuk menguji hipotesis Kuznets dapat digunakan regresi non linier. Regresi non linier model kuadratik merupakan hubungan antara dua peubah yang terdiri dari variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) sehingga akan diperoleh suatu kurva yang membentuk garis lengkung menaik ($\beta_2 > 0$) atau menurun ($\beta_2 < 0$) (Utama, 2011). Dalam hal ini pembuktian kurva U-terbalik dilakukan dengan menghubungkan antara angka Indeks Williamson dengan PDRB perkapita provinsi Jawa Barat. Untuk itu digunakan Regresion Curve Estimation dengan persamaan sebagai berikut:

$$IW = \alpha + \beta_1 Y + \beta_2 Y^2 + \epsilon$$

Keterangan:

- IW = Angka Indeks Williamson
- α = Konstanta
- $\beta_{1,2}$ = Koefisien regresi
- Y = PDRB perkapita
- ϵ = Residu

2. Analisis Location Quotient (LQ)

Metode Location Quotient (Tarigan, 2005) digunakan untuk mengetahui sektor basis atau potensial suatu daerah tertentu. Metode ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di daerah (kabupaten/kota) dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas (provinsi).

Rumus Location Quotient (LQ) adalah (Tarigan, 2005):

$$LQ = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Keterangan:

Si = Nilai tambah sektor i di kabupaten kota

S = PDRB di kabupaten/kota

Ni = Nilai tambah sektor i di provinsi Jawa Barat

N = PDRB di provinsi

Dari perhitungan LQ, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sektor tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam daerah saja namun juga kebutuhan di luar daerah karena sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan.
- b. Jika nilai $LQ = 1$, maka sektor tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan di daerahnya saja.
- c. Jika nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor non basis dan perlu impor produk dari luar daerah karena sektor ini kurang prospektif untuk dikembangkan.

3. Analisis Shift Share

Analisis Shift Share adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Analisis shift-share digunakan untuk melihat output total dari sektor-sektor negara baik dari faktor lokasi maupun pengaruh dari struktur industri. Analisis ini digunakan untuk melengkapi analisis LQ yang telah dilakukan sebelumnya.

Analisis *Shift Share* menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan satu sama lain, yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi nasional (national share)
Menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah. Nilai national share positif di daerah daerah (kabupaten/kota) yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah daerah (kabupaten/kota) yang tumbuh lebih lambat atau merosot dibandingkan dengan pertumbuhan secara nasional (provinsi Jawa Barat)
- b. Pergeseran Proporsional (*proportional shift*)
Menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi provinsi atau nasional. Pergeseran proporsional (*proportional shift*) disebut juga pengaruh

bauran industri (*industry mix*). Pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan referensi. Komponen ini positif di daerah-daerah (kabupaten/kota) yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional (provinsi Jawa Barat) tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah (kabupaten/kota) yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional (provinsi Jawa Barat) tumbuh dengan lambat atau merosot.

- c. Pergeseran differensial (*differential shift*)
Menunjukkan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran differensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif. Jika nilai komponen ini positif, maka sektor tersebut sektor yang kompetitif karena mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai nilai negatif dan mengalami penurunan competitiveness.

Menurut Tri Widodo (2006) bentuk umum persamaan dari analisis shift share dan komponen-komponennya adalah :

$$> D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

$$> N_{ij} = E_{ij} \times R_n$$

$$> M_{ij} = E_{ij} (R_{in} - R_n)$$

$$> C_{ij} = E_{ij} (R_{ij} - R_{in})$$

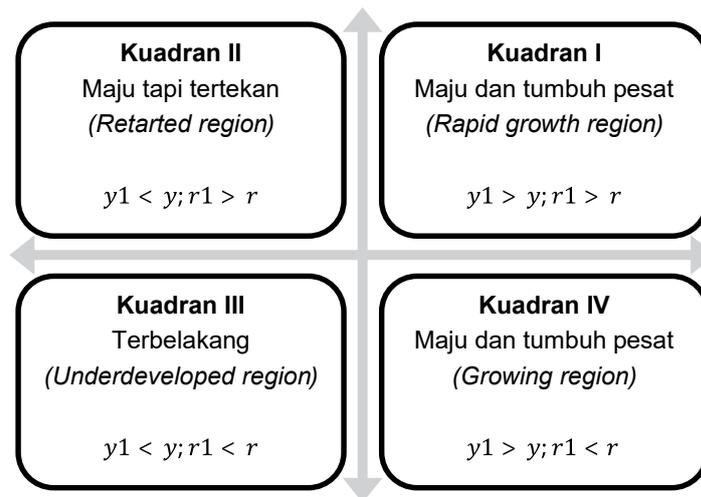
Keterangan:

D_{ij} = Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah (kab/kota) dari pengaruh pertumbuhan nasional (provinsi Jawa Barat)

N_{ij} = (*National share*) pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional (provinsi Jawa Barat) terhadap perekonomian di suatu daerah (kab/kota).

M_{ij} = Pergeseran proporsional (*proportional shift*) atau pengaruh bauran industri

C_{ij} = (*Differential Shift*) pengaruh keunggulan kompetitif suatu sektor tertentu (kab/kota) dibanding tingkat nasional (provinsi Jawa Barat)



Gambar 3. Klasifikasi Typologi Klassen

Sumber: Syafrizal, 1997

- Eij = PDRB (*output*) sektor i (kab/kota)
- Rij = Tingkat pertumbuhan sektor i (kab/kota)
- Rin = Tingkat pertumbuhan sektor i (provinsi Jawa Barat)
- Rn = Tingkat pertumbuhan PDRB (provinsi Jawa Barat)

4. Analisis *Typologi Klassen*

Melalui analisis ini diperoleh empat klasifikasi melalui pendekatan wilayah. Kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang berbeda-beda diklasifikasikan dengan tipologi Klassen pendekatan wilayah (Syafrizal, 1997). (pada Gambar 3.)

Keterangan:

- y1 = PDRB perkapita kabupaten/kota
- y = pendapatan total perkapita provinsi Jawa Barat
- r1 = laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota
- r = laju pertumbuhan total PDRB provinsi Jawa Barat

- a. Daerah tumbuh maju dan cepat (*Rapid Growth Region*/Kuadran I)
Daerah maju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth Region*) adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhannya. Biasanya daerah-

- daerah ini merupakan merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat. Karena diperkirakan daerah ini akan terus berkembang dimasa mendatang.
- b. Daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region*/Kuadran II)
Daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region*) adalah daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.
- c. Daerah relatif tertinggal (*Underdeveloped Region*/Kuadran III)
Daerah relatif tertinggal (*Underdeveloped Region*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan PDRB perkapita yang berada dibawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa di daerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya.

- d. Daerah berkembang cepat (*Growing Region* / Kuadran IV)
 Daerah berkembang cepat (*Growing Region*) pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena itu dimasa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

kecil sehingga pendapatan semakin merata. Demikian sebaliknya, semakin besar angka indeks Williamson maka semakin timpang pendapatannya atau pendapatannya semakin tidak merata. Berikut tabel indeks Williamson di provinsi Jawa Barat tahun 1998-2013.

Selama periode penelitian tahun 1998-2013, angka indeks Williamson menunjukkan angka yang serius. Rata-rata angka indeks Williamson menunjukkan angka 0,5781 (> 0,5), angka indeks Williamson sebesar ini menunjukkan telah terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang sangat tinggi. Dari tahun 1998-2013, perekonomian Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi juga diikuti dengan besarnya angka ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan teori Neo Marxist yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan selalu menyebabkan melebarnya jurang ketimpangan. Dengan diketahui telah terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang sangat tinggi, pemerintah provinsi Jawa Barat perlu merespon hal ini dengan melakukan upaya-upaya yang lebih serius dalam membangun infrastruktur dan penyebaran pusat-pusat pertumbuhan dan investasi secara lebih merata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Tingkat Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 1998-2013

Besar kecilnya ketimpangan PDRB provinsi Jawa Barat memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Untuk mengukur ketimpangan yang terjadi di provinsi Jawa Barat digunakan indeks Williamson. Semakin kecil atau mendekati angka nol (0), maka ketimpangan akan semakin

Tabel 2. Hasil Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat Tahun 1998-2013

Tahun	Indeks Williamson
1998	0,4785
1999	0,4140
2000	0,5124
2001	0,6081
2002	0,6157
2003	0,6293
2004	0,6210
2005	0,6062
2006	0,6215
2007	0,6112
2008	0,5862
2009	0,5711
2010	0,5942
2011	0,6002
2012	0,5973
2013	0,5831
Rata-rata	0,5781

Sumber: BPS provinsi Jawa Barat, 2015. Diolah

Hipotesis Kuznets Tentang “U Terbalik” di Provinsi Jawa Barat Tahun 1998-2013

Untuk menguji hipotesis Kuznets dapat digunakan regresi non linier. Menggunakan aplikasi SPSS 17.0, untuk mendapatkan kurva regresi non linier dapat digunakan fasilitas *analysis regesion curve estimation*, sehingga diperoleh kurva yang membentuk garis lengkung menaik ($\beta_2 > 0$) atau menurun ($\beta_2 < 0$).

Berikut adalah model persamaan regresi non linier hubungan antara angka indeks Williamson dengan PDRB perkapita provinsi Jawa Barat tahun 1998-2013. (Tabel 3)

Hubungan angka indeks Williamson dengan PDRB perkapita provinsi Jawa Barat diperoleh konstanta -0,942, β_1 sebesar 4,477E-7, dan β_2 sebesar -3,195E-14. Nilai koefisien β_2 bernilai negatif ($\beta_2 < 0$) menunjukkan akan diperoleh suatu kurva yang membentuk garis melengkung

menurun. Nilai signifikansi sebesar 0,001 secara statistic menunjukkan model *regesion curve estimation* dapat diterima sehingga persamaan *regesion curve estimation* adalah

$$IW = -0,942 + 0,0000004477Y - 0,000000000000003195Y^2.$$

Pembuktian kurva “U terbalik” dilakukan dengan membuat kurva hubungan antara angka indeks Williamson dengan PDRB perkapita sebagai berikut. (Gambar 4)

Kurva hubungan antara indeks Williamson dengan PRB perkapita provinsi Jawa Barat menyerupai huruf “U terbalik”, ini membuktikan pada awal terjadinya pertumbuhan ekonomi disertai dengan ketimpangan yang memburuk, tetapi pada masa berikutnya ketimpangan akan semakin menurun. Bentuk kurva seperti “U terbalik” ini juga menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets berlaku di provinsi Jawa Barat pada periode penelitian 1998-2013.

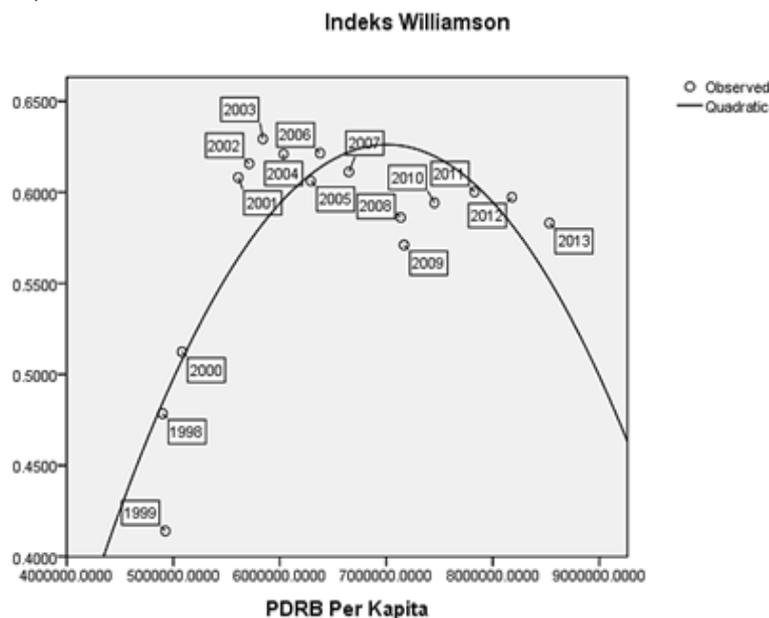
Tabel 3. Hubungan Antara Angka Indeks Williamson Dengan PDRB Perkapita Provinsi Jawa Barat Tahun 1998-2013

Dependent Variable: Indeks Williamson

Equation	Model Summary					Parameter Estimates		
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1	b2
Quadratic	.647	11.924	2	13	.001	-.942	4.477E-7	-3.195E-14

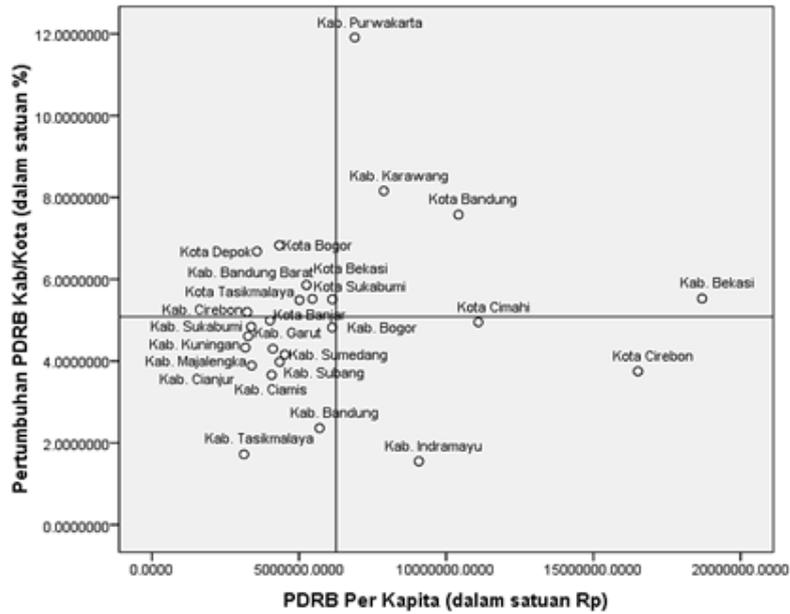
The independent variable is PDRB Per Kapita.

Sumber: Penulis/hasil penelitian



Gambar 4. Hubungan Antara Angka Indeks Williamson Dengan PDRB Perkapita Provinsi Jawa Barat Tahun 1998-2013

Sumber: Penulis/hasil penelitian



Gambar 5. Pola Klasifikasi Kemajuan Pembangunan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 199-2013

Sumber: Penulis/hasil penelitian

Klasifikasi Kemajuan Pembangunan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 1998-2013

Melalui tipologi Klassen diperoleh klasifikasi kemajuan pembangunan setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat sebagai berikut. (Gambar 5)

Berdasarkan tipologi Klassen diatas, dibedakan kemajuan pembangunan ekonomi setiap kabupaten/kota menjadi empat klasifikasi, yaitu daerah tumbuh maju dan cepat (*Rapid Growth Region*/Kuadran I), daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region*/Kuadran II), daerah relatif tertinggal (*Underdeveloped Region*/Kuadran III), dan daerah berkembang cepat (*Growing Region* / Kuadran IV). Secara lebih jelas mengenai pengklasifikasian kabupaten/kota berdasarkan tipologi Klassen, dapat dilihat pada tabel berikut.

Hasil analisis tipologi Klassen kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 1998-2012 menunjukkan; (1) Kab. Purwakarta, kab. Karawang, kab. Bekasi, dan kota Bandung berada dalam kuadran I. Artinya keempat kabupaten/kota ini memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang berada diatas pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita provinsi Jawa Barat. Daerah yang berada pada kuadran I ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara

baik untuk kemakmuran masyarakat setempat. Diperkirakan daerah ini akan terus berkembang dimasa mendatang. (2) Kab. Cirebon, kab. Bandung Barat, kota Bogor, kota Bekasi, kota Sukabumi, kota Depok, dan kota Tasikmalaya berada dalam kuadran II. Artinya kabupaten/kota ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari provinsi Jawa Barat, tetapi PDRB perkapitanya lebih tinggi dari provinsi Jawa Barat. Daerah yang berada pada kuadran II ini merupakan daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar. (3) Kab. Bogor, kab. Sukabumi, kab. Cianjur, kab. Bandung, kab. Garut, kab. Tasikmalaya, kab. Ciamis, kab. Kuningan, kab. Majalengka, kab. Sumedang, kab. Subang, dan kota Banjar berada dalam kuadran III. Artinya kabupaten/kota ini memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang lebih rendah dari provinsi Jawa Barat. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah yang berada dalam kuadran III ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa didaerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana

Tabel 4. Hasil Analisis Tipologi Klasen Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 1998-2013

<p>Kuadran II Maju tapi Tertekan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Cirebon • Kab. Bandung Barat • Kota Bogor • Kota Bekasi • Kota Sukabumi • Kota Depok • Kota Tasikmalaya 	<p>Kuadran I Maju dan Tumbuh Pesat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Purwakarta • Kab. Karawang • Kab. Bekasi • Kota Bandung
<p>Kuadran III Tertinggal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Bogor • Kab. Sukabumi • Kab. Cianjur • Kab. Bandung • Kab. Garut • Kab. Tasikmalaya 	<p>Kuadran IV Berkembang Cepat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kab. Indramayu • Kota Cirebon • Kota Cimahi

Sumber: Penulis/hasil penelitian

perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya. (4) Kab. Indramayu, kota Cirebon, dan kota Cimahi berada dalam kuadran IV. Artinya kabupaten/kota ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari provinsi Jawa Barat, tetapi PDRB perkapitanya lebih rendah dari provinsi Jawa Barat. Daerah yang berada dalam kuadran IV ini dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhannya tinggi namun tingkat PDRB perkapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena itu dimasa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

Dengan acuan klasifikasi kemajuan daerah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4, pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunannya perlu memberikan prioritas pada daerah yang relatif tertinggal (daerah pada kuadran III) tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pada kuadran lainnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengejar

ketertinggalan daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah-daerah lainnya.

Sektor potensial untuk dikembangkan pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat

Untuk melihat sektor-sektor potensial mana sajakah yang dapat dikembangkan, dalam penelitian ini digunakan metode *Location Quotient* dan *Shift Share*. Adapun karena jumlah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat sangat banyak (26 kabupaten/kota), maka dilakukan pembatasan pembahasan dalam penelitian ini. Kabupaten/kota yang akan dibahas pada analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* ini adalah kota Bandung (mewakili daerah kuadran I), kota Depok (mewakili daerah kuadran II), kab. Ciamis (mewakili daerah kuadran III), dan kab. Indramayu (mewakili daerah kuadran IV).

Untuk mengetahui sektor basis atau potensial suatu daerah tertentu di hunikan metode *Location Quotient* (Tarigan, 2005). Metode ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di daerah (kabupaten/kota) dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas (provinsi Jawa Barat).

Hasil perhitungan LQ setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2004-2013 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2013

Kabupaten/Kota	Sektor								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kabupaten									
1 Kab. Bogor	0,40	0,40	1,46	1,64	0,98	0,76	0,56	0,52	0,59
2 Kab. Sukabumi	2,86	1,69	0,42	0,52	0,69	0,89	1,09	1,16	1,48
3 Kab. Cianjur	3,64	0,04	0,07	0,35	0,98	1,20	1,43	1,56	1,43
4 Kab. Bandung	0,61	0,45	1,43	0,83	0,54	0,73	0,81	0,66	0,71
5 Kab. Garut	3,80	0,05	0,16	0,23	0,86	1,27	0,56	1,06	1,39
6 Kab. Tasikmalaya	3,72	0,08	0,18	0,45	0,34	1,02	0,93	1,12	2,01
7 Kab. Ciamis <i>Daerah kuadran III</i>	2,52	0,12	0,17	0,29	1,84	1,21	1,61	1,65	2,20
8 Kab. Kuningan	2,83	0,26	0,05	0,20	1,39	1,04	1,53	1,88	2,99
9 Kab. Cirebon	2,49	0,14	0,33	0,96	2,19	1,07	1,16	1,31	1,81
10 Kab. Majalengka	2,27	1,43	0,40	0,31	1,45	0,95	1,27	1,57	1,93
11 Kab. Sumedang	2,14	0,04	0,60	1,13	0,80	1,27	0,71	1,25	1,12
12 Kab. Indramayu <i>Daerah kuadran IV</i>	1,62	11,48	0,45	0,18	0,48	0,79	0,68	0,42	0,66
13 Kab. Subang	2,49	4,03	0,34	0,51	0,82	1,04	0,96	1,20	1,19
14 Kab. Purwakarta	0,80	0,05	1,13	1,07	0,87	1,12	0,62	1,45	0,69
15 Kab. Karawang	0,79	1,39	1,14	1,31	0,85	0,97	0,71	0,49	0,89
16 Kab. Bekasi	0,16	0,44	1,86	0,80	0,40	0,46	0,30	0,33	0,32
17 Kab. Bandung Barat	0,94	0,18	1,06	3,17	0,73	0,90	1,09	0,85	0,82
Kota									
18 Kota Bogor	0,02	0,14	0,66	1,43	2,13	1,38	1,95	4,27	1,06
19 Kota Sukabumi	0,32	0,31	0,12	0,56	1,92	2,02	3,31	2,60	1,96
20 Kota Bandung <i>Daerah kuadran I</i>	0,02	0,00	0,64	1,05	1,52	1,80	2,11	1,60	1,51
21 Kota Cirebon	0,03	0,00	0,79	0,93	1,41	1,40	2,84	2,06	1,11
22 Kota Bekasi	0,07	0,00	1,04	1,69	1,13	1,32	1,73	1,18	0,93
23 Kota Depok <i>Daerah kuadran II</i>	0,24	0,00	0,95	1,39	1,96	1,43	1,01	1,18	1,09
24 Kota Cimahi	0,01	0,00	1,42	1,64	1,89	0,94	0,32	0,62	0,84
25 Kota Tasikmalaya	0,68	0,00	0,42	0,71	3,24	1,41	1,71	3,12	1,76
26 Kota Banjar	1,63	0,10	0,28	0,45	1,58	1,55	1,42	2,00	2,07

Sumber: BPS provinsi Jawa Barat, 2015. Diolah

Keterangan:

Sektor 1= Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan

Sektor 2= Sektor pertambangan dan penggalian

Sektor 3= Sektor industry pengolahan

Sektor 4= Sektor listrik, gas, dan air bersih

Sektor 5= Sektor bangunan

Sektor 6= Sektor perdagangan, hotel, dan restoran

Sektor 7= Sektor pengangkutan dan komunikasi

Sektor 8= Sektor keuangan, persewaaan, dan jasa perusahaan

Sektor 9= Sektor jasa-jasa

Berdasarkan hasil perhitungan LQ kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat dalam periode waktu 2004-2013, maka didapat informasi sebagai berikut:

1. Kota Bandung (mewakili daerah kuadran I)
Kota Bandung memiliki sektor basis pada Sektor listrik, gas, dan air bersih; Sektor bangunan; Sektor

perdagangan, hotel, dan restoran; Sektor pengangkutan dan komunikasi; Sektor keuangan, persewaaan, dan jasa perusahaan; Sektor jasa-jasa. Sektor ini melayani pasar di kota Bandung maupun di luar kota Bandung.

2. Kota Depok (mewakili daerah kuadran II)
Kota Depok memiliki sektor basis pada Sektor listrik, gas, dan air bersih; Sektor bangunan; Sektor perdagangan, hotel, dan restoran; Sektor pengangkutan dan komunikasi; Sektor keuangan, persewaaan, dan jasa perusahaan; dan Sektor jasa-jasa. Sektor ini melayani pasar di kota Depok maupun di luar kota Depok.
3. Kabupaten Ciamis (mewakili daerah kuadran III)
Kabupaten Ciamis memiliki sektor basis pada. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; Sektor bangunan; Sektor perdagangan, hotel, dan restoran; Sektor pengangkutan

dan komunikasi; Sektor keuangan, persewaaan, dan jasa perusahaan; dan Sektor jasa-jasa. Sektor ini melayani pasar di kabupaten Ciamis maupun di luar kabupaten Ciamis. Khusus untuk sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menunjukkan angka LQ paling tinggi di banding sektor lainnya di kabupaten Ciamis. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan adalah sektor yang paling kuat mempengaruhi PDRB kabupaten Ciamis dan potensial untuk dikembangkan.

4. Kabupaten Indramayu (mewakili daerah kuadran IV)
Kabupaten Indramayu memiliki sektor basis pada Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; dan Sektor pertambangan dan penggalian. Sektor ini melayani pasar di kabupaten Indramayu maupun di luar kabupaten Indramayu. Khusus untuk sektor Sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan angka LQ paling tinggi di banding sektor lainnya di kabupaten Indramayu. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan adalah sektor yang paling kuat mempengaruhi PDRB kabupaten Indramayu potensial untuk dikembangkan.

Analisis *Shift Share* adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Analisis ini digunakan untuk melengkapi analisis LQ yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil perhitungan *Shift Share* kota Bandung

(mewakili daerah kuadran I), kota Depok (mewakili daerah kuadran II), kab. Ciamis (mewakili daerah kuadran III), dan kab. Indramayu (mewakili daerah kuadran IV) tahun 2004-2013 dapat dilihat sebagai berikut.

1. Kota Bandung (mewakili daerah kuadran I)
Kota Bandung mengalami pertambahan nilai absolut produktifitas kinerja perekonomian daerah sebesar 244.605,64 milyar rupiah. Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij yang positif pada semua sektor kegiatan ekonomi. (Tabel 6)

Sektor ekonomi yang kompetitif (dilihat dari angka Cij yang positif) di kota Bandung selama periode pengamatan terdiri dari Sektor listrik, gas, dan air bersih; Sektor bangunan; Sektor perdagangan, hotel, dan restoran; Sektor pengangkutan dan komunikasi; Sektor keuangan, persewaaan, dan jasa perusahaan; dan Sektor jasa-jasa. Khusus untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran (sektor 6) menunjukkan angka Cij paling tinggi di banding sektor lainnya di kota Bandung. Ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran (sektor 6) adalah sektor yang paling kompetitif dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat perekonomian Jawa Barat dan sektor ini adalah sektor potensial untuk dikembangkan. Nilai Cij yang negative mengindikasikan bahwa sektor ekonomi tersebut mengalami penurunan tingkat kekompetitifan relatif terhadap sektor ekonomi yang sama di tingkat perekonomian Jawa Barat. Sektor ekonomi yang mengalami penurunan tingkat kekompetitifan relatif di kota Bandung adalah Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; dan Sektor industry pengolahan.

Melalui pengukuran Mij memungkinkan untuk

Tabel 6. Hasil Perhitungan *Shift Share* Kota Bandung Tahun 2004-2013

Sektor	Pertumbuhan			Komponen			
	Rn	Rin	Rij	Nij (EijxRn)	Mij Eij(Rin-Rn)	Cij Eij(Rij-Rin)	Dij (Nij+Mij+Cij)
1		2,53	0,49	408,69	-231,41	-143,01	34,28
2		1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		5,24	4,28	44.651,26	-4.503,58	-7.383,65	32.764,02
4		7,16	9,76	4.028,62	918,15	1.797,51	6.744,28
5		8,21	9,57	8.562,01	3.488,89	1.999,80	14.050,70
6		7,87	10,95	66.283,50	23.176,44	35.006,23	124.466,18
7		6,75	9,73	18.514,49	2.912,07	9.455,62	30.882,18
8		7,38	7,74	9.036,71	2.394,51	561,46	11.992,69
9		6,77	7,84	17.615,93	2.842,25	3.213,13	23.671,32
Total	5,83			169.101,20		44.507,12	244.605,64

Sumber: BPS provinsi Jawa Barat, 2015. Diolah

mengetahui apakah perekonomian kota Bandung terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat dari pada perekonomian Jawa Barat. Nilai Mij positif di kota Bandung selama periode pengamatan terdiri dari Sektor listrik, gas, dan air bersih; Sektor bangunan; Sektor perdagangan, hotel, dan restoran; Sektor pengangkutan dan komunikasi; Sektor keuangan, persewaaan, dan jasa perusahaan; dan Sektor jasa-jasa. Artinya kota Bandung telah berspesialisasi dalam sektor-sektor ini, yaitu sektor-sektor yang secara nasional (provinsi Jawa Barat) tumbuh lebih cepat.

Angka total Nij kota Bandung yang positif sebesar 169.101,20 milyar rupiah menunjukkan bahwa perekonomian kota Bandung selama periode pengamatan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian Jawa Barat sebesar 169.101,20 milyar rupiah.

2. Kota Depok (mewakili daerah kuadran II)
Kota Depok mengalami penambahan nilai absolut produktifitas kinerja perekonomian daerah sebesar 40.670,27 milyar rupiah. Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij yang positif pada semua sektor kegiatan ekonomi. (Tabel 7)

Sektor ekonomi yang kompetitif (dilihat dari angka Cij yang positif) di kota Depok selama periode pengamatan terdiri dari Sektor industri pengolahan; dan Sektor bangunan.. Khusus untuk Sektor industri pengolahan (sektor 3) menunjukkan angka Cij paling tinggi di banding sektor lainnya di kota Depok. Ini menunjukkan bahwa Sektor industri pengolahan (sektor 3) adalah sektor yang paling kompetitif dibandingkan dengan sektor yang sama di

tingkat perekonomian Jawa Barat dan sektor ini adalah sektor potensial untuk dikembangkan. Nilai Cij yang negative mengindikasikan bahwa sektor ekonomi tersebut mengalami penurunan tingkat kekompertifan relatif terhadap sektor ekonomi yang sama di tingkat perekonomian Jawa Barat. Sektor ekonomi yang mengalami penurunan tingkat kekompertifan relatif di kota Depok adalah Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; Sektor listrik, gas, dan air bersih; Sektor keuangan, persewaaan, dan jasa perusahaan; Sektor jasa-jasa; dan Sektor pengangkutan dan komunikasi.

Melalui pengukuran Mij memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian kota Depok terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat dari pada perekonomian Jawa Barat. Nilai Mij positif di kota Depok selama periode pengamatan terdiri dari Sektor jasa-jasa; Sektor keuangan, persewaaan, dan jasa perusahaan; Sektor pengangkutan dan komunikasi; Sektor perdagangan, hotel, dan restoran; Sektor bangunan; dan Sektor listrik, gas, dan air bersih. Artinya kota Depok telah berspesialisasi dalam sektor-sektor ini, yaitu sektor-sektor yang secara nasional (provinsi Jawa Barat) tumbuh lebih cepat.

Angka total Nij kota Depok yang positif sebesar 35.253,75 milyar rupiah menunjukkan bahwa perekonomian kota Depok selama periode pengamatan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian Jawa Barat sebesar 35.253,75 milyar rupiah.

3. Kabupaten Ciamis (mewakili daerah kuadran III)
Kabupaten Ciamis mengalami penurunan

Tabel 7. Hasil Perhitungan Shift Share Kota Depok Tahun 2004-2013

Sektor	Pertumbuhan			Komponen			
	Rn	Rin	Rij	Nij (EijxRn)	Mij Eij(Rin-Rn)	Cij Eij(Rij-Rin)	Dij (Nij+Mij+Cij)
1		2,53	2,10	1.022,05	-578,70	-75,54	367,80
2		1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		5,24	6,30	14.116,78	-1.423,84	2.551,38	15.244,32
4		7,16	7,07	1.101,57	251,05	-17,22	1.335,40
5		8,21	8,50	2.300,28	937,33	116,98	3.354,59
6		7,87	7,75	10.858,20	3.796,64	-228,10	14.426,74
7		6,75	5,54	1.822,97	286,73	-377,64	1.732,06
8		7,38	6,58	1.399,83	370,92	-190,62	1.580,12
9		6,77	5,83	2.632,08	424,67	-427,52	2.629,23
Total	5,83			35.253,75		1.351,71	40.670,27

Sumber: BPS provinsi Jawa Barat, 2015. Diolah

Tabel 8. Hasil Perhitungan Shift Share Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2014

Sektor	Pertumbuhan			Komponen			
	Rn	Rin	Rij	Nij (EijxRn)	Mij Eij(Rin-Rn)	Cij Eij(Rij-Rin)	Dij (Nij+Mij+Cij)
1		2,53	1,84	12.451,92	-7.050,47	-1.479,90	3.921,55
2		1,41	2,35	137,92	-104,54	22,31	55,69
3		5,24	6,10	2.901,76	-292,68	424,60	3.033,69
4		7,16	6,98	268,10	61,10	-8,42	320,79
5		8,21	-0,06	2.382,68	970,90	-3.377,36	-23,78
6		7,87	6,98	10.609,97	3.709,84	-1.612,95	12.706,87
7		6,75	4,95	3.335,15	524,57	-1.026,74	2.832,98
8		7,38	5,24	2.252,64	596,90	-826,69	2.022,84
9		6,77	12,04	6.290,92	1.015,01	5.687,11	12.993,04
Total	5,83			40.631,06		-2.198,04	37.863,66

Sumber: BPS provinsi Jawa Barat, 2015. Diolah

kinerja perekonomian daerah pada Sektor bangunan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij yang negative pada sektor tersebut (sektor 5). Akan tetapi, secara keseluruhan selama periode pengamatan menunjukkan produktifitas kinerja perekonomian Kabupaten Ciamis sebesar 37.863,66 milyar rupiah.

Sektor ekonomi yang kompetitif (dilihat dari angka Cij yang positif) di kabupaten Ciamis selama periode pengamatan terdiri dari Sektor pertambangan dan penggalian; Sektor industry pengolahan; dan Sektor jasa-jasa. Khusus untuk Sektor jasa-jasa (sektor 9) menunjukkan angka Cij paling tinggi di banding sektor lainnya di kabupaten Ciamis. Ini menunjukkan bahwa Sektor jasa-jasa (sektor 9) adalah sektor yang paling kompetitif dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat perekonomian Jawa Barat dan sektor ini adalah sektor potensial untuk dikembangkan. Nilai Cij yang negative mengindikasikan bahwa sektor ekonomi tersebut mengalami penurunan tingkat kekompetitifan relatif terhadap sektor ekonomi yang sama di tingkat perekonomian Jawa Barat. Sektor ekonomi yang mengalami penurunan tingkat kekompetitifan relatif di kabupaten Ciamis adalah Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; Sektor listrik, gas, dan air bersih; Sektor bangunan; Sektor perdagangan, hotel, dan restoran; Sektor pengangkutan dan komunikasi; Sektor keuangan, persewaaan, dan jasa perusahaan.

Melalui pengukuran Mij memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian kabupaten Ciamis terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat dari pada perekonomian Jawa Barat. Nilai Mij positif di kabupaten Ciamis selama periode pengamatan terdiri dari Sektor

listrik, gas, dan air bersih; Sektor bangunan; Sektor perdagangan, hotel, dan restoran; Sektor pengangkutan dan komunikasi; Sektor keuangan, persewaaan, dan jasa perusahaan; dan Sektor jasa-jasa. Artinya kabupaten Ciamis telah berspesialisasi dalam sektor-sektor ini, yaitu sektor-sektor yang secara nasional (provinsi Jawa Barat) tumbuh lebih cepat.

Angka total Nij kabupaten Ciamis yang positif sebesar 40.631,06 milyar rupiah menunjukkan bahwa perekonomian kabupaten Ciamis selama periode pengamatan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian Jawa Barat sebesar 40.631,06 milyar rupiah.

4. Kabupaten Indramayu (mewakili daerah kuadran IV)

Kabupaten Indramayu mengalami penurunan kinerja perekonomian daerah pada Sektor industry pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij yang negative pada sektor tersebut (sektor 3). Akan tetapi, secara keseluruhan selama periode pengamatan menunjukkan produktifitas kinerja perekonomian kabupaten Indramayu sebesar 38.103,91 milyar rupiah. (Tabel 9)

Sektor ekonomi yang kompetitif (dilihat dari angka Cij yang positif) di kabupaten Indramayu selama periode pengamatan terdiri dari Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; Sektor bangunan; dan Sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Khusus untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran (sektor 6) menunjukkan angka Cij paling tinggi di banding sektor lainnya di kabupaten Indramayu. Ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran (sektor 6) adalah sektor yang paling kompetitif

Tabel 9. Hasil Perhitungan *Shift Share* Kabupaten Indramayu Tahun 2004-2013

Sektor	Pertumbuhan			Komponen			
	Rn	Rin	Rij	Nij (EijxRn)	Mij Eij(Rin-Rn)	Cij Eij(Rij-Rin)	Dij (Nij+Mij+Cij)
1		2,53	2,86	16.202,87	-9.174,31	916,09	7.944,64
2		1,41	0,50	26.534,94	-20.112,77	-4.133,96	2.288,21
3		5,24	-1,71	15.519,47	-1.565,31	-18.493,73	-4.539,57
4		7,16	6,27	335,11	76,37	-51,18	360,30
5		8,21	13,17	1.344,37	547,81	1.144,90	3.037,08
6		7,87	9,24	14.105,88	4.932,21	3.301,14	22.339,23
7		6,75	6,71	2.864,71	450,58	-21,26	3.294,02
8		7,38	5,31	1.148,82	304,41	-407,73	1.045,50
9		6,77	3,69	3.694,05	596,02	-1.955,57	2.334,49
Total	5,83			81.750,22		-19.701,31	38.103,91

Sumber: BPS provinsi Jawa Barat, 2015. Diolah

dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat perekonomian Jawa Barat dan sektor ini adalah sektor potensial untuk dikembangkan. Nilai Cij yang negative mengindikasikan bahwa sektor ekonomi tersebut mengalami penurunan tingkat kekompertifan relatif terhadap sektor ekonomi yang sama di tingkat perekonomian Jawa Barat. Sektor ekonomi yang mengalami penurunan tingkat kekompertifan relatif di kabupaten Indramayu adalah Sektor pertambangan dan penggalian; Sektor industry pengolahan; Sektor listrik, gas, dan air bersih; Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; Sektor pengangkutan dan komunikasi; dan Sektor jasa-jasa.

Melalui pengukuran Mij memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian kabupaten Indramayu terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat dari pada perekonomian Jawa Barat. Nilai Mij positif di kabupaten Indramayu selama periode pengamatan terdiri dari Sektor listrik, gas, dan air bersih; Sektor bangunan; Sektor pengangkutan dan komunikasi; Sektor perdagangan, hotel, dan restoran; Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan Sektor jasa-jasa. Artinya kabupaten Indramayu telah berspesialisasi dalam sektor-sektor ini, yaitu sektor-sektor yang secara nasional (provinsi Jawa Barat) tumbuh lebih cepat.

Angka total Nij kabupaten Indramayu yang positif sebesar 81.750,22 milyar rupiah menunjukkan bahwa perekonomian kabupaten Indramayu selama periode pengamatan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian Jawa Barat sebesar 81.750,22 milyar rupiah.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan,

disimpulkan bahwa, tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat pasca orde baru menunjukkan angka yang serius. Rata-rata angka indeks Williamson pasca orde baru menunjukkan telah terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang sangat tinggi. Hipotesis Kuznets tentang "U terbalik" berlaku di provinsi Jawa Barat pasca orde baru. Hal ini dapat dilihat dari kurva hubungan antara indeks Williamson dengan PDRB perkapita provinsi Jawa Barat menyerupai huruf "U terbalik".

Pengklasifikasian kemajuan pembangunan ekonomi setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat pasca orde baru menggunakan analisis Tipologi Klasen menunjukkan sebanyak empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bandung berada pada kuadran I (daerah maju dan tumbuh pesat). Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya berada pada kuadran II (daerah maju tapi tertekan). Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kota Banjar berada pada kuadran III (daerah tertinggal). Dan kuadran IV (daerah berkembangan cepat) ditempati oleh Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, dan kota Cimahi.

Menunakan analisis *Location Quotient* dan *Shift Share*, didapatkan bahwa Kota Bandung (mewakili daerah kuadran I) memiliki sektor potensial pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan Sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor ini adalah sektor yang perlu dikembangkan agar kota Bandung terus

berkembang dimasa mendatang. Kota Depok (mewakili daerah kuadran II) memiliki sektor potensial pada sektor industri pengolahan dan sektor bangunan Sektor ini adalah sektor yang perlu terus dikembangkan agar kota Depok dapat meningkatkan perekonomiannya yang selama periode pengamatan tahun 2004-2013 tergolong daerah dengan perekonomian yang maju tapi tertekan. Kabupaten Ciamis (mewakili daerah kuadran III) memiliki sektor potensial pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; dan sektor bangunan dan Sektor jasa-jasa. Sektor ini adalah sektor yang perlu terus dikembangkan agar kabupaten Ciamis dapat meningkatkan perekonomiannya yang selama periode pengamatan tahun 2004-2013 tergolong daerah dengan perekonomian yang tertinggal. Kabupaten Indramayu (mewakili daerah kuadran IV) memiliki sektor potensial pada sektor pertambangan dan penggalian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor ini adalah sektor yang perlu terus dikembangkan agar kabupaten Indramayu dapat dapat berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Asta, Mohamad. (1999). *PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 1995-1998*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Asta, Mohamad. (2000). *Jawa Barat Dalam Angka 1999*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Asta, Mohamad. (2000). *PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 1996-1999*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Asta, Mohamad. (2001). *PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 1997-2000*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Emilia, & Imelia. (2006). *Modul Ekonomi Regional*. Jambi: Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Jambi.
- Heriawan, Rusman. (2008). *Produk Dometik Regional Bruto Kabupaten/Kota Indonesia 2003-2007*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Ismail, Lukman. (2004). *Jawa Barat Dalam Angka 2003*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Ismail, Lukman. (2004). *PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2001-2003*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Ismail, Lukman. (2006). *PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2003-2005*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Ismail, Lukman. (2008). *Jawa Barat Dalam Angka 2007*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Ismail, Lukman. (2009). *PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2006-2008*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Ismail, Lukman. (2011). *Jawa Barat Dalam Angka 2000*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Ismail, Lukman. (2011). *Jawa Barat Dalam Angka 2010*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Juanda, D. P. (2011). *Kompilasi dan Analisis PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2008-2010*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Juanda, D. P. (2013). *Kompilasi dan Analisis PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010-2012*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Juanda, D. P. (2013). *Kompilasi dan Analisis PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010-2012*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Juanda, D. P. (2014). *Kompilasi dan Analisis PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011-2013*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah-Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho. (2004). *Model Basis Untuk Model Perencanaan Daerah*. Dinamika Pembangunan Vol 1 No. 1, 23-30.
- Prapti, L. (2006). *Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah 2000-2004)*. Semarang: FE UNDIP.
- Purwana, Gema. (2013). *Jawa Barat Dalam Angka 2012*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Purwana, Gema. (2014). *Jawa Barat Dalam Angka 2013*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Purwana, Gema. (2016). *Jawa Barat Dalam Angka 2015*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Soedarti. (2002). *Produk Dometik Regional Bruto Kabupaten/Kota Indonesia 1998-2001*. Bandung: BPS Jawa Barat.
- Surbakti, Soedarti. (2004). *Produk Dometik Regional Bruto Kabupaten/Kota Indonesia 2000-2003*. Bandung: BPS Jawa Barat.